

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada tahun 2021 memicu lahirnya kebijakan kontroversial yang membatasi hak atas pendidikan, khususnya bagi perempuan. Larangan terhadap akses pendidikan formal bagi anak perempuan dan wanita, baik sebagai peserta didik maupun tenaga pengajar, berdampak luas. Guru perempuan kehilangan mata pencaharian, sementara anak laki-laki usia sekolah menghadapi dilema antara melanjutkan pendidikan atau bekerja demi menopang keluarga. Ketimpangan ini memperlemah ketahanan sosial dan memperluas dampak kebijakan diskriminatif. UNESCO sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab atas pendidikan melakukan berbagai intervensi strategis dengan pendekatan managerial, yang dapat dikategorikan dalam tiga aspek, yaitu *monitoring*, *capacity building*, dan *problem solving*.

Dalam aspek monitoring, UNESCO aktif memantau situasi pendidikan melalui koordinasi dengan Dewan Eksekutif (sesi ke-212 hingga ke-220), menyoroti hak perempuan, meminta laporan berkala dari negara anggota, serta mendorong kolaborasi internasional. Bersama TAGHEER Institute, UNESCO mengumpulkan data penurunan mahasiswa dan pendapatan pendidikan swasta sebagai dasar rekomendasi strategis. Kolaborasi dengan UNICEF, DPG, dan Kelompok Kerja Pendidikan lokal turut memperkuat kerangka kerja AESTF.

Pada aspek *capacity building*, UNESCO menjalankan program Literacy and Learning Possibilities untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan dasar dan keterampilan pra-vokasional. Sejak awal 2023, lebih dari 60% dari 25.000 peserta adalah perempuan dan remaja putri. Peningkatan kapasitas guru dilakukan melalui asesmen, reformasi kurikulum, pelatihan, dan penyediaan alat digital. Program AESTF memastikan pelatihan guru mencakup keahlian pedagogis dan dukungan psikososial. Kolaborasi donor melalui CapED, BESAF, dan ANEP memperkuat kebijakan, perencanaan, dan literasi dewasa. CapED mendukung pembentukan NSDES dan strategi TVET berbasis komunitas. BESAF mengimplementasikan National Training Programme (NTP) bersama Kementerian Pendidikan Afghanistan. ANEP menargetkan pemuda dan dewasa dari komunitas terpinggirkan melalui pendirian 70 Sekolah Literasi Dewasa.

Dalam aspek *problem solving*, UNESCO membagi intervensi ke dalam bantuan teknis dan finansial. Bantuan teknis mencakup penyelesaian kurikulum melalui AESTF dan laporan GCSESA untuk mengidentifikasi dampak konflik terhadap akses pendidikan. Bantuan finansial diwujudkan melalui pengembangan radio pendidikan bersama Begum TV di 19 provinsi dan pembangunan sekolah di Kandahar melalui STFA, kolaborasi lintas sektor dengan 10 badan PBB.

Secara keseluruhan, upaya UNESCO sepanjang 2021–2024 menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga keberlanjutan pendidikan di tengah krisis. Melalui monitoring, penguatan kapasitas, dan pemecahan masalah yang strategis, UNESCO

menjembatani standar global dengan kebutuhan lokal Afghanistan, memastikan hak atas pendidikan tetap terjamin bahkan dalam situasi paling genting.

4.2 Saran

Upaya UNESCO dalam *monitoring*, *capacity building*, dan *problem solving* selama 2021–2024 telah memberikan fondasi penting bagi pendidikan pasca-konflik di Afghanistan. Namun, untuk memperkuat dampak intervensi, penulis menyarankan penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi efektivitas kolaborasi antar-lembaga, khususnya dengan badan PBB yang memiliki mandat operasional dan akses politik lebih kuat seperti UNOPS dan UNHCR. Mengingat keterbatasan UNESCO dalam pengadaan infrastruktur pendidikan, kemitraan dengan entitas tersebut dapat membuka jalur implementasi yang lebih tangguh dan kontekstual. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji model kolaborasi lintas-lembaga yang adaptif terhadap dinamika politik lokal, termasuk analisis komparatif antara pendekatan normatif UNESCO dan pendekatan operasional UNOPS/UNHCR. Kajian ini juga perlu mencakup aspek diplomatik dan keamanan sebagai faktor pendukung keberlangsungan program pendidikan.